

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan politik luar negeri tidak hanya mengacu pada perubahan orientasi politik luar negeri suatu negara secara holistik, namun juga perubahan cara dan strategi dalam mencapai tujuan juga digolongkan sebagai perubahan politik luar negeri. Seperti yang dikemukakan oleh Herman bahwa perubahan politik luar negeri juga dapat terjadi pada metode atau cara atas permasalahan yang dihadapi¹. Hal inilah yang dilakukan oleh Cina dalam upaya reunifikasi dengan Taiwan. Pada Oktober 2007, Kongres Partai Komunis Cina ke-17 menyatakan *Peace and Development* sebagai tema utama hubungan dengan Taiwan sekaligus sebagai strategi dalam upaya reunifikasi dengan Taiwan². *Peace and Development strategy* menekankan pendekatan yang kooperatif pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya namun tidak mengesampingkan tujuan reunifikasi yang telah menjadi cita-cita Cina sejak kemerdekaannya pada 1949. Langkah ini merupakan perubahan besar dari strategi Cina terhadap Taiwan karena Cina tidak lagi menekankan strategi koersif dalam kebijakan terkait isu Taiwan seperti yang selama ini digunakan sejak tahun 1949.

¹ Hermann, Charles. *Changing Course: When Government Choose to redirect Foreign Policy*. International Studies Quarterly. 1990, 5.

² Chu, Shulong. 2013. *Cross-Taiwan Strait Relations: Opportunities and Challenges*. Tsinghua University: tersedia dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcarnegieendowment.org%2Ffiles%2FShulong_Chu.pdf&ei=SLswVLDVAs-gugSNs4HYAg&usq=AFQjCNEckAAbPdUT223IRi1KwZWoZoLIPQ&bvm=bv.76802529.d.c2E (diakses 29 September 2014)

Secara konsisten sejak dinyatakan dalam Kongres Partai Komunis Cina ke-17 pada Oktober 2007, Cina menerapkan strategi kooperatif dalam upaya reunifikasi dengan Taiwan. Presiden Hu mengungkapkan bahwa: “the Mainland will continue to push peaceful development as the central theme, creating new situation and development of peace and development in the relationship”.

Hal ini sesuai dengan berbagai pernyataan resmi oleh beberapa pemimpin Cina. Seperti pada Kongres CCP ke-18³ dimana Hu Jintau⁴ dengan jelas melihat bahwa tujuan jangka panjang dari strategi *Peace and Deveolpment* tetap untuk mengejar reunifikasi dengan Taiwan:

“To resolve the Taiwan question and achieve the complete reunification of China is an irresistible historical process. Peaceful reunification is in the best interests of the Chinese nation, including our compatriots in Taiwan. To achieve peaceful reunification, we must, above everything else, ensure the peaceful growth of relations between the two sides of the Taiwan Straits.”⁵

Dalam kesempatan tersebut Hu Jintau juga menegaskan pentingnya konsep *One China* sebagai prinsip fundamental dalam hubungan Cina dan Taiwan:

“Although the mainland and Taiwan are yet to be reunified, the fact that both belong to one China has never changed. China's territory and sovereignty have always been indivisible and no division will be tolerated. The two sides of the Taiwan Straits should uphold the common stand of opposing Taiwan independence and of following the ‘1992 Consensus’. We are ready to conduct exchanges, dialogue and cooperation with any

³ Kongress CCP ke-18 diselenggarakan pada November 2012 yang membahas mengenai pedoman dan sikap politik CCP secara umum untuk periode lima tahun, salah satunya membahas mengenai kebijakan Cina terhadap Taiwan (<http://www.china.org.cn/>, 2012).

⁴ Hu Jintau adalah Sekretaris Umum Partai Komunis Cina pada November 2002 dan kemudian menjadi Presiden Cina pada 15 Maret 2003 hingga 15 Maret 2013 (<http://www.biography.com/>, t.t.).

⁵ Embassy of the People's Republic of China in the People's Republic of Bangladesh. *Full Text of Hu Jintao's Report at 18th CPC Party Congress* t.t <http://bd.china-embassy.org/eng/ckzl/ddhwj/t996515.htm> (diakses 29 September 2014)

political party in Taiwan as long as it does not seek Taiwan independence and recognizes the one-China principle.”⁶

Laporan dari Kongres Partai tersebut diatas mengindikasikan bahwa Cina masih memiliki tujuan yang sama untuk tetap melakukan reunifikasi dengan Taiwan. Diharapkan dengan adanya kerjasama ekonomi sosial yang semakin meningkat akan meningkatkan kepentingan bersama diantara keduanya. Hu Jintao menekankan untuk menggunakan strategi *Peaceful and Development* dalam hubungan Cina dan Taiwan dimana kedua pihak seharusnya membangun hubungan baik dengan menekankan kerjasama dan membuat kemajuan-kemajuan baru⁷.

Dalam semangat menjalankan *Peaceful Development* dengan Taiwan, Cina berupaya untuk meningkatkan interaksi kerjasama dengan Taiwan. Salah satu momentum penting dari upaya Cina untuk mempererat dependensi Taiwan terhadap Cina adalah dengan ditandatanganinya *Cross-Strait Service Trade Agreement*⁸ pada 2013 yang dinilai sebagai momentum kunci ketika Cina mencoba mengikat Taiwan untuk lebih dekat tidak hanya dalam hubungan ekonomi, tapi juga sosial budaya. Perjanjian ini kemudian mendapatkan protes dari gerakan mahasiswa dan sebagian rakyat Taiwan melalui *Sunflower Movement* yang dimulai pada tahun Maret 2014 dan masih berlangsung hingga tahun 2015.

Langkah Cina untuk menggunakan strategi kooperatif dalam upaya reunifikasi dengan Taiwan merupakan perubahan besar sejak separasi Cina dan

⁶ Embassy of the People's Republic of China in the People's Republic of Bangladesh. *Full Text of Hu Jintao's Report*.

⁷ Zhao Yanan and Tan Zongyang. *Closer Relations Welcomed*. China Daily. March 23, 2012, 1

⁸ *Cross-Strait Service Trade Agreement* adalah perjanjian antara Cina dan Taiwan yang ditandatangani pada Juni 2013 namun belum diratifikasi oleh pemerintahan legislatif Taiwan. Perjanjian ini ditujukan untuk meliberalisasi perdagangan jasa antara kedua negara yang mencakup bidang industri, perbankan, pariwisata, film, telekomunikasi, dan penerbitan. Dengan perjanjian ini arus investasi dan usaha akan memperoleh akses yang lebih lancar. Perusahaan akan lebih mudah untuk mendirikan kantor-kantor cabang di lintas wilayah lain (Fan 2014).

Taiwan yang bertepatan dengan kemerdekaan Cina pada tahun 1949. Pada tahun 1949 hingga tahun 2007, Cina lebih memilih menggunakan pendekatan koersif yang mengedepankan instrument militer dan *high politics* sebagai bentuk strategi untuk mengupayakan reunifikasi dengan Taiwan.

Perubahan strategi konflik Cina dalam upaya reunifikasi dengan Taiwan pada era Hu Jintao tidak bisa dipisahkan dari konsepsi *China's Peaceful Rise*⁹ oleh Zheng Bijian¹⁰. Pada awalnya baik Presiden Hu Jintao maupun Perdana Menteri Wen Jiabao mengadopsi penggunaan kata *Peaceful Rise* (*heping jueqi*) dalam pidato publik pada akhir tahun 2003 dan awal tahun 2004. Setelahnya dokumen dan pertanyaan resmi Cina tidak lagi menggunakan istilah ini, namun menggunakan *China's Peaceful Development* (*heping fazhan*) yang kemudian secara sistematis dijelaskan dalam Buku Putih yang dirilis pada 2005. Meskipun sejatinya konsepsi *China's Peaceful Rise* dan *China's Peaceful Development* memiliki esensi yang sama, pemerintahan Hu Jintao lebih memilih penggunaan istilah *Peaceful Development* dibanding *Peaceful Rise* untuk . Makna dan konotasi dari *Peaceful Rise* telah dipertimbangkan dalam lingkaran kebijakan dan secara luas dikonsultasikan dengan pengamat internasional¹¹. Istilah “*rise*” dianggap dapat membawa makna "tiba-tiba muncul (atau naik) di cakrawala" yang dapat

⁹ *Peaceful Rise* adalah pemikiran bahwa kebangkitan Cina dalam bidang ekonomi, politik, dan militer tidak akan menjadi ancaman bagi stabilitas perdamaian dan keamanan internasional. Dalam Pandangan Zheng, konsepsi *Peaceful Rise* akan mengantarkan Cina untuk menjahui hubungan konfrontasi dengan kekuatan-kekuatan dunia

¹⁰ Zhen Bijian merupakan rekan dekat dan penasihat politik luar negeri Presiden Hu Jintao. Ketika Hu menjabat sebagai direktur Central Party School, dimana ide-ide Partai Komunis terbentuk, Zheng menjabat menjadi wakil direktur. Sejak Hu Jintao menduduki kursi presiden, Zheng memimpin China Reform Forum, sebuah kelompok yang terkait dengan pemerintahan yang bertugas memastikan kebangkitan Cina dalam komunitas global dalam koridor damai.

¹¹ Buhi, Jason. *Foreign Policy and the Chinese Constitutions During the Hu Jintao Administration*. Int'l & Comp. L. Rev. 241. 2014, 257. <http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol37/iss2/2>

memperkuat kekhawatiran masyarakat internasional mengenai kehadiran Cina sebagai potensi ancaman terhadap tatanan internasional.

I.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan perubahan strategi Cina dalam upaya reunifikasi dengan Taiwan dari menggunakan model strategi koersi menjadi model strategi kooperatif dalam kerangka *Peace and Development Strategy* sejak adanya konsepsi *China's Peaceful Rise* yang diusung oleh Zheng Bijian pada tahun 2002, maka dapat disusun rumusan masalah yakni: bagaimana peran *China's Peaceful Development* sebagai citra diri nasional (*national self-image*) terhadap perubahan strategi konflik Cina dalam upaya reunifikasi dengan Taiwan?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran citra diri nasional dalam pembentukan strategi konflik suatu negara dengan melihat peran *China's Peaceful Development* sebagai citra diri nasional dalam pembentukan strategi konflik Cina terhadap perubahan strategi konflik Cina dalam upaya reunifikasi dengan Taiwan.

I.4 Kerangka Pemikiran

I.4.1 Tinjauan Literatur

Dalam menjelaskan perubahan strategi konflik, ada beberapa teori yang dapat digunakan. Salah satunya adalah teori perubahan politik luar negeri oleh Charles Hermann yang mampu menunjukkan bentuk-bentuk perubahan yang

termasuk dalam kategori perubahan politik luar negeri. Dalam modelnya Hermann mengungkapkan adanya empat bentuk perubahan yang termasuk dalam kategori perubahan politik luar negeri, yakni: 1) *adjustment changes*, 2) *program changes*, 3) *problem/goal changes*, dan 4) *international orientation changes*¹².

Pertama adalah *adjustment changes* yakni dimana perubahan terjadi pada tingkatan usaha (lebih besar atau lebih sedikit) dan atau dalam skop penerima (seperti perbaikan target)¹³. Apa yang dilakukan, bagaimana hal tersebut dilakukan, dan tujuan dilakukannya tidak mengalami perubahan.

Kedua adalah *program changes* dimana perubahan terjadi pada metode atau arti dari tujuan atau permasalahan yang dihadapi¹⁴. Berbeda dengan *adjustment changes* yang cenderung lebih kuantitatif, *program changes* adalah kualitatif dan melibatkan instrumen baru negara (seperti penggunaan negosiasi diplomasi dibandingkan kekuatan militer). Dalam model *program change* yang dapat terlihat adalah perubahan pada konfigurasi instrumen dan tingkatan komitmen¹⁵.

Ketiga adalah *problem/goal changes* dimana permasalahan atau tujuan awal dari kebijakan yang dibuat mengalami pergantian atau dihilangkan sama sekali. Dalam perubahan politik luar negeri model ini maksud (*purposes*) politik luar negeri itu sendiri telah digantikan.

Keempat adalah *international orientation change* yang juga merupakan bentuk paling ekstrim dari perubahan politik luar negeri yang melibatkan

¹² Hermann, Charles. *Changing Course: When Government Choose to redirect Foreign Policy*. *International Studies Quarterly*: (34) 1. 1990, 5-6.

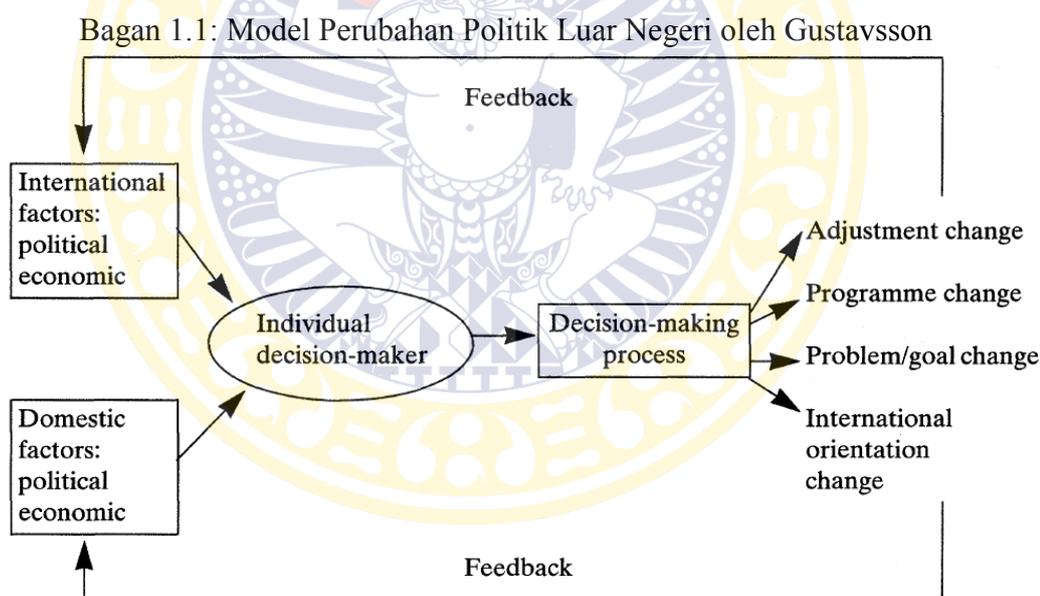
¹³ Hermann, Charles. *Changing Course: When Government Choose to redirect Foreign Policy*. 1990, 5.

¹⁴ Hermann, Charles. *Changing Course: When Government Choose to redirect Foreign Policy*. 1990, 5.

¹⁵ Hermann, Charles. *Changing Course: When Government Choose to redirect Foreign Policy*. 1990, 6.

perubahan arah orientasi aktor tertentu dalam interaksi internasional. Berbeda dengan tiga model perubahan politik luar negeri lain yang menekankan pada pendekatan aktor terhadap isu atau aktor lain, model perubahan orientasi internasional ini melibatkan perubahan dasar aktor terhadap peran dan aktivitas dalam dunia internasional.

Bentuk-bentuk perubahan politik luar negeri oleh Hermann kemudian digunakan oleh Jakob Gustavsson untuk menjelaskan proses perubahan politik luar negeri yang berkelanjutan dan saling terkait antara sumber-sumber perubahan politik luar negeri, individu-individu pengambil keputusan, dan bentuk-bentuk perubahan politik luar negeri.



Sumber: Gustavsson 1999, 85

Faktor-faktor ekonomi dan politik dalam level domestik maupun level internasional harus diperhatikan oleh individu-individu pembuat kebijakan dimana individu-individu pembuat keputusan mengalami perubahan dalam kepercayaan mereka sehingga memunculkan dampak pada perubahan politik luar negeri.

Ketika individu kunci telah mengalami perubahan dalam kepercayaan mereka, hal yang dilakukan kemudian adalah individu-individu pembuat keputusan berupaya menghasilkan perubahan politik luar negeri melalui struktur institusional. Gustavsson tidak hanya menekankan pada prosedur pembuatan kebijakan secara formal, tetapi juga memperhatikan proses *pulling and hauling* yang ada dalam proses politik, yakni strategi yang digunakan oleh aktor untuk membujuk dan memanipulasi aktor lain untuk menerima orientasi politik yang baru. Hasil akhir dari proses tersebut diatas adalah tipologi perubahan politik luar negeri milik Hermann. Perubahan politik luar negeri yang dikeluarkan kemudian menciptakan umpan balik terhadap faktor-faktor internasional dan domestik yang memungkinkan perubahan politik luar negeri kembali dimasa mendatang.

Teori perubahan politik luar negeri oleh Hermann dan Gustavsson tersebut diatas telah mampu menjelaskan faktor-faktor domestik dan internasional sebagai sumber perubahan politik luar negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan politik luar negeri suatu negara tidak serta merta terjadi dengan sendirinya. Perubahan politik luar negeri suatu negara merupakan akumulasi proses sumber-sumber yang mempengaruhi individu-individu penting pada proses pembuatan keputusan. Lebih jauh, teori perubahan politik luar negeri telah mampu menunjukkan signifikansi peran individu-individu pembuat keputusan sebagai artikulator dari sumber-sumber yang berasal dari domestik dan internasional.

Namun teori perubahan politik luar negeri belum mampu menunjukkan hubungan antara pembentukan citra diri nasional terhadap perubahan strategi konflik yang menjadi fokus kajian pada tulisan ini. Oleh karenanya penting untuk melihat peluang teori lain yang menjelaskan mengenai politik luar negeri.

Penjelasan mengenai politik luar negeri negara dapat ditemui pada beberapa teori besar dalam ilmu Hubungan Internasional seperti struktural neorealis dan neoliberalis institusional. Dalam struktural neorealis yang diusung oleh Kenneth N. Waltz yang menjelaskan bahwa politik luar negeri merupakan hasil dari penyeimbangan antara kapabilitas yang berbeda dalam sistem internasional¹⁶. Perspektif dominan lain, neoliberalis institusional, lebih banyak menyanggah perspektif realis dengan menyatakan bahwa negara dapat bekerjasama satu dengan lainnya tanpa secara konstan menyeimbangkan kekuatan mereka dengan kekuatan negara lain. Institusional neoliberalis melihat bahwa tatanan institusi internasional akan membentuk transparansi politik dan pada akhirnya dapat menurunkan resiko konflik diantar negara-negara¹⁷. Persamaan antara kedua perspektif dominan ini kemudian tidak mampu merasionalisasi politik luar negeri negara tertentu karena keduanya berasumsi bahwa kepentingan negara secara umum dibentuk oleh faktor-faktor material seperti faktor-faktor militer dan ekonomi¹⁸. Perspektif-perspektif tersebut diatas lebih tertarik untuk menjelaskan mengapa sistem internasional berperilaku perilaku tertentu dari pengamatan historis dan berfokus pada rasionalitas aktor-aktor negara.

Tulisan ini berupaya untuk menjabarkan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi perubahan strategi dalam politik luar negeri Cina dalam kasus ini bukan semata berlandaskan kepentingan material. Selain itu tulisan ini menunjukkan bahwa kepentingan negara tidak serba hadir begitu saja dalam

¹⁶ Waltz, Kenneth N. *Theory of International Politics*. Dalam: Peter J. Katzenstein, *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Columbia University Press. 1996.

¹⁷ Keohane, Robert O. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Dalam: Peter J. Katzenstein, *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Columbia University Press. 1996.

¹⁸ Katzenstein, Peter J. *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Columbia University Press. 1996.

lingkungan aktor-aktor rasional, namun kepentingan, dalam hal ini politik luar negeri, dikonstruksikan melalui sebuah proses dari interaksi-interaksi sosial. Identitas nasional adalah sesuatu yang bersifat politis dan mengalami pembentukan setiap saat oleh masyarakat¹⁹ dan elit-elit politik²⁰.

Oleh karenanya dalam menjelaskan hubungan budaya dan identitas dengan pembentukan politik luar negeri, penulis menggunakan peringkat analisa budaya dan identitas dalam kebijakan luar negeri. Peringkat analisa ini berakar dari perspektif konstruktivisme yang berasumsi bahwa perilaku sebuah negara didasari oleh kepentingan nasional yang didasari dari faktor ideasional yang disebut sebagai identitas nasional. Hal ini didasari dari kepercayaan bahwa seluruh aktifitas manusia merupakan produk dan komponen dari budaya dan identitas. Menurut Japperson et. al.²¹ perspektif konstruktivis berfokus pada cara dimana norma-norma, institusi-institusi, dan fitur-fitur budaya lingkungan domestik dan internasional mempengaruhi perspektif keamanan, kepentingan, dan kebijakan suatu negara. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Hudson²² bahwa kebijakan luar negeri merupakan cerminan, bentuk dari budaya dan identitas nasional negara yang kemudian keduanya saling membentuk sama lain dan bersifat dinamis dalam tatanan waktu dan konteks tertentu.

Dalam peringkat analisis budaya dan identitas setidaknya ada beberapa bentuk yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, yakni citra diri

¹⁹ Hudson, Valerie M. (2014). *Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory*, Rowman & Littlefield.

²⁰ Clunan, Anne L. *The Social Construction of Russia's Resurgence: Aspirations, Identity, and Security Interests*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 2009.

²¹ Jepperson, Ronald L., Alexander Wendt, and Peter J. Katzenstein. *Norms, Identity, and Culture in National Security*. edited by: Peter J. Katzenstein, *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*, Columbia University Press, New York, 1996, 37.

²² Hudson, Valerie M. *Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory*, Rowman & Littlefield. 2014.

nasional (*national self-image*), *strategic culture*²³, identitas agama²⁴, konsepsi peranan negara²⁵, dan ideologi²⁶. Penulis berfokus pada pembahasan citra diri dan pengaruhnya terhadap politik luar negeri suatu negara

Citra diri merupakan bentuk identitas kognitif yang dibentuk melalui bagaimana sebuah negara memandang dirinya sendiri yang merupakan tahapan awal mengenai bagaimana suatu negara membedakan dirinya dengan yang lain. Citra diri diciptakan oleh elit politik berdasarkan nilai-nilai kultural, ikatan emosional diantara manusia dan teritori yang ditinggali. Citra diri cenderung bersifat dinamis karena dibentuk oleh elit-elit politik yang tengah berkuasa. Citra diri oleh Clunan digambarkan sebagai akumulasi dari aspirasi-aspirasi historis seperti mitos, legenda, dan cerita kebanggaan masa lalu yang kemudian membentuk pandangan terhadap diri sendiri sebagai entitas tertentu²⁷. Citra diri berfungsi sebagai pedoman mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh negara. Identifikasi citra diri terdiri atas: 1) ide-ide mengenai status internasional dan tujuan politik yang ingin dicapai; 2) preskripsi mengenai menjadi apa dan apa

²³ yang menekankan pada tradisi, nilai, tata krama, pola perilaku, hukum adat, dan cara unik yang membantu sebuah negara atau entitas beradaptasi dengan lingkungan dan menyelesaikan permasalahan yang ada. *Strategic culture* diwujudkan dalam peran militer dan penggunaan kekuatan.

²⁴ Identitas agama termasuk dalam tatanan identitas nasional karena agama dapat berperan sebagai sumber legitimasi identitas. Negara mampu memandang dunia berdasarkan nilai-nilai fundamental yang ada dalam sebuah negara. Agama sebagai identitas yang ada dalam praktek sosial secara terus menerus akan menghasilkan citra diri. Elemen agama sebagai identitas dicirikan oleh: 1) kelompok-kelompok agama atau frekuensi praktek; dan 2) institusi-institusi keagamaan yang melekat kuat dengan institusi-institusi kenegaraan (Warner & Walker 2011, 113-135).

²⁵ konsepsi peranan negara di lingkungan internasional. Konsepsi peranan negara memberikan gambaran mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh negara atau misi apa yang dibawa oleh sebuah negara. Konsepsi peranan negara memiliki tiga elemen utama yakni: 1) deskripsi dari misi nasional dalam politik internasional; 2) ide-ide spesifik mengenai hubungan antar negara; dan 3) cenderung stabil dari waktu ke waktu (Hostli 1970, 233-209).

²⁶ Ideologi adalah terjemahan dari prinsip-prinsip atau nilai kedalam instruksi aksi-aksi tertentu. Ideologi adalah kepercayaan yang mengantarakan suatu entitas untuk bertindak bersarkan kepercayaan tersebut. Elemen dari ideologi sebagai identitas dalam politik luar negeri adalah: 1) abstraksi dari kebijakan-kebijakan; 2) sistem kepercayaan prinsipil atau filosofis; 3) dan bersifat preskriptif.

²⁷ Clunan, Anne L. *The Social Construction of Russia's Resurgence: Aspirations, Identity, and Security Interests*. 2009, 6.

yang harus dilakukan oleh negara; 3) menekankan peran kelompok pembuat keputusan sebagai pembentuk dan artikulator citra diri nasional dengan pertimbangan historis yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan dan politik luar negerinya.

Menurut Clunan, citra diri dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dan politik luar negeri yang pada akhirnya diwujudkan dalam politik luar negerinya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) pembentukan citra diri nasional sebagai identitas nasional sementara; 2) penguatan citra diri menjadi identitas nasional yang dominan dengan; 3) legitimasi citra diri nasional dimata elit politik yang diuji melalui *historical test* dan *self-efficacy test*; dan 4) pembentukan kepentingan nasional dari identitas nasional yang telah dominan ditandai dengan penggunaan *identity management strategies*.²⁸

Peringkat analisis identitas telah membuktikan bahwa identitas mampu mempengaruhi kebijakan dan politik luar negerinya. Terlebih lagi peringkat analisis identitas dalam politik luar negeri telah menekankan bahwa identitas nasional dapat dibentuk dengan sengaja oleh kelompok pembuat keputusan sebagai jalan untuk mencapai kepentingan.

Penulis melihat bahwa fitur-fitur yang dimiliki oleh *China's Peaceful Development* memiliki kecocokan sebagai citra diri nasional. Identifikasi secara umum dapat dilihat dari kecocokan fitur-fitur yang kemudian akan dijelaskan pada operasionalisasi konsep. Peringkat analisis identitas dalam politik luar negeri diatas mampu menjelaskan *China's Peaceful Development* yang telah masuk kedalam Buku Putih Cina tahun 2005 dan 2011 sebagai identitas yang dibentuk

²⁸ Clunan, Anne L. *The Social Construction of Russia's Resurgence: Aspirations, Identity, and Security Interests*. 2009, 47-48, 204.

oleh faktor-faktor ideasional (dinyatakan sebelumnya bahwa *China's Peaceful Development* berakar dari konsepsi *China's Peaceful Rise* yang diusung oleh Zheng Bijian pada tahun 2002) yang kemudian diartikulasikan oleh pemerintahan Hu Jintao.

Peringkat analisis identitas dalam politik luar negeri nyatanya hanya berhenti pada penjelasan bahwa politik luar negeri suatu negara tidak berasal hanya dari faktor-faktor material, namun juga berasal dari faktor ideasional seperti identitas nasional. Implikasinya adalah peringkat analisis identitas dalam politik luar negeri tidak mampu menjelaskan hubungan antara citra diri nasional dan pemilihan dan perubahan strategi konflik negara. Oleh karenanya penulis menambahkan analisa psikopolitik yang menghubungkan antara citra diri nasional, persepsi terhadap musuh, dan strategi konflik melalui tipologi berdasarkan penelitian Noel Kaplowitz tahun 1990.

I.4.2 Pendekatan Psikopolitik: Citra Diri Nasional, Persepsi terhadap Musuh, dan Strategi Konflik

Dalam menjelaskan perilaku negara pada situasi konflik, terkadang perspektif-perspektif besar dalam ilmu Hubungan Internasional belum mampu untuk menjabarkan alasan-alasan dibalik pemilihan strategi tertentu yang diterapkan oleh negara dalam situasi konflik. Hal inilah yang melatarbelakangi Kaplowitz, seorang peneliti dari University of California, kemudian melakukan analisa menggunakan pendekatan psikopolitik dalam merasionalisasi tingkah laku negara menggunakan instrumen citra diri nasional dan persepsi terhadap musuh

digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa pemilihan strategi yang dipilih oleh negara dalam suatu konflik yang dihadapi.

Secara umum pendekatan psikopolitik menekankan pada faktor-faktor kognitif sebagai salah satu determinan dalam pembuatan keputusan dan oleh karenanya berperan penting dalam teori psikopolitik dalam konflik internasional. Namun analisa terhadap faktor-faktor kognitif saja belum mampu menjelaskan dinamika interaksi antara dua negara, seperti misalnya perubahan kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh satu negara terhadap yang lain, atau mengapa kedua negara yang berkonflik memutuskan untuk menggunakan pendekatan kooperasi dari pendekatan koersi yang telah berjalan sebelumnya. Sampai kemudian ditemukan bahwa struktur kognitif kompleks sangat berkaitan dengan jangkauan perilaku yang dimiliki oleh aktor-aktor pembuat keputusan dalam masalah internasional²⁹ dan kompleksitas ini kemudian mengurangi kecenderungan pecahnya perang akibat banyaknya interaksi perilaku aktor-aktor pengambil keputusan dalam memutus masalah internasional yang tengah dihadapi oleh negara.³⁰ Namun para scholar psikopolitik klasik ini belum menjelaskan bahwa kompleksitas pengambilan keputusan tidak sebatas mencegah pecahnya perang, namun juga dapat membuahkan hasil keputusan yang bersifat konstruktif

Kaplowitz kemudian menambahkan empat aspek dalam tulisannya untuk menjelaskan hubungan sebab akibat pemilihan strategi konflik suatu negara dilihat dari faktor-faktor kognitif dalam teori psikopolitik, yakni: 1) citra diri nasional dapat menjadi variabel krusial dalam menentukan perilaku konflik negara; 2)

²⁹ Shapiro, M. J., and Bonham, G. M. *Cognitive Process and Foreign Policy Decision-Making*. Int. Studies Q. 17. 1973, 147-176.

³⁰ Suedfeld, P., Tetlock, P. E., and Rodriguez, C. *Peace, War, and Integrative Complexity*. Journal of Conflict Resolution 21. 1977, 427-442.

persepsi terhadap musuh berperan dalam membedakan persepsi diantara pihak-pihak yang berkonflik dan juga berperan dalam menentukan perilaku konflik suatu negara; 3) bertemunya variabel citra diri nasional dan persepsi terhadap musuh berhubungan erat dengan variasi strategi konflik yang ada, artinya bahwa variasi strategi konflik yang tersedia merupakan pertemuan antara citra diri nasional dan persepsi terhadap musuh yang dimiliki oleh negara; dan 4) bahwa ragam citra (*modal image*) sebagai identitas memiliki sifat yang berubah secara bertahap dibandingkan analisa oleh pemimpin-pemimpin individu, hal ini mengimplikasikan bahwa teori pembuatan kebijakan tidak selalu bergantung dan atau terbatas pada kepemimpinan ideosinkresi individu tertentu.

Tipologi yang dituangkan oleh Kaplowitz didasarkan pada hubungan variabel citra diri nasional dan persepsi terhadap musuh yang akhirnya berpengaruh pada hasil strategi yang dipilih. Memahami variabel-variabel dalam tipologi tersebut diatas mampu memudahkan untuk melihat hubungan sebab akibat yang ada diantara ketiganya.

Variabel pertama adalah citra diri nasional. Menurut Kaplowitz citra diri nasional bagaimana masyarakat mempresepsi diri sendiri, misalnya apa yang disukai atau tidak disukai oleh masyarakat terhadap diri sendiri; bagaimana mereka memandang sejarah dan pelajaran yang didapatkan darinya; aspirasi; cara yang ingin ditempuh dalam melakukan perubahan; persepsi tujuan dan kepentingan nasional; persepsi kekuatan; dan batasan diri sendiri. Variabel citra diri nasional dipilih karena mampu mengkompromikan dimesi kognitif dan afektif dan karena citra diri nasional mempengaruhi perilaku negara secara langsung dan tidak langsung, sadar dan tidak sadar, serta menyediakan konstruksi utama untuk

menjembatani kesenjangan antara analisa psikologi kognitif atas sikap dan perilaku politik luar negeri suatu negara.³¹

Hubungan antara citra diri nasional dan pemilihan strategi konflik adalah sebagai berikut: 1) semakin besar dan negatif manifestasi citra diri nasional, maka semakin besar kecenderungan negara untuk memilih strategi totalis yang mengendaki kemenangan total dan berimplikasi pada kekalahan pihak lain; dan 2) semakin positif citra diri nasional suatu negara, maka semakin besar kecenderungan untuk menggunakan strategi kooperasi yang menghendaki hasil memuaskan bagi kedua belah pihak dalam situasi konflik. Citra diri nasional dapat beroperasi pada perkembangan orientasi konflik dan strategi ketika pemimpin, pembuat keputusan, dan elit terkemuka merefleksikannya kedalam suatu kebijakan atau politik luar negeri.³² Hal ini berarti Kaplowitz juga menekankan peran penting aktor pembuat keputusan sebagai artikulatur citra diri nasional untuk diwujudkan dalam politik luar negeri mereka.

Variabel kedua adalah persepsi terhadap musuh. Logika dari persepsi terhadap musuh dan politik luar negeri adalah bahwa persepsi yang benar adalah kunci menuju pembentukan kebijakan yang rasional dan efektif, sedangkan mispersepsi akan membentuk kebijakan yang tidak rasional. Beberapa persepsi kelompok pembuat kebijakan mungkin benar misalnya mengenai posisi musuh, namun salah mengenai hal lainnya. Pembuat keputusan bukan berarti abai dengan kesalahan persepsi diantara mereka, namun interpretasi yang dihasilkan oleh para

³¹ Kaplowitz, Noel. *National Self-Image, Perception of Enemies, and Conflict Strategies: Psychopolitical Dimensions of International Relations*. International Society of Political Psychology, Vol. 11, No. 1. 1990, 49. Available at: <http://www.jstor.org/stable/3791515>

³² Kaplowitz, Noel. *National Self-Image, Perception of Enemies, and Conflict Strategies: Psychopolitical Dimensions of International Relations*. 1990, 51.

pembuat keputusan dipengaruhi erat oleh kebutuhan, tujuan, dan aspirasi yang merupakan bagian dari citra diri nasional dalam proses pengambilan keputusan

Persepsi terhadap musuh dapat berbentuk sebagai kerenggangan antara citra dan kenyataan (*misperception*) dan kerenggangan dalam persepsi (*differences in perceptions*) antara pihak-pihak yang berinteraksi dalam konflik. Mispersepsi digambarkan sebagai jarak antara gambaran dan kenyataan. Yang termasuk dalam mispersepsi dalam kajian proses kognitif adalah: 1) menyangkal informasi yang tidak sesuai dengan kepercayaan yang telah ada, meskipun jika informasi tersebut adalah fakta; 2) salah menaruh analogi masa lalu; 3) *premature cognitive colusure*; 4) rasionalisasi setelah pengambilan keputusan untuk menurunkan ketidaksesuaian; 5) kegagalan untuk mengenali tarik menarik fakta; 6) menghindari pilihan-pilihan yang sulit; dan 7) perubahan-perubahan tambahan dalam *image* dibandingkan ide-ide fundamental³³. Sedangkan perbedaan persepsi dicirikan oleh 1) bagaimana suatu bangsa melihat kekuatan, karakter, kepercayaan, dan ketekunan dirinya dan pihak lain terhadap suatu isu; 2) bagaimana mereka mengartikan suatu peristiwa bagi diri mereka sendiri dan pihak lawan; 3) bagaimana mereka mempersepsi perbedaan yang terjadi dalam memahami suatu hal bagi diri sendiri dan pihak lawan dalam konflik; dan 4) bagaimana mereka mempersepsi sejarah dan legitimasi pihak lawan konflik.

Akumulasi kedua variabel citra diri nasional dan persepsi terhadap musuh akan menghasilkan strategi konflik. Strategi konflik adalah rencana dan aksi yang dibentuk untuk mencapai tujuan dan orientasi konflik³⁴. Hal ini didasari oleh teori

³³ Lebow dalam Kaplowitz, Noel. *National Self-Image, Perception of Enemies, and Conflict Strategies: Psychopolitical Dimensions of International Relations*. 1990, 52.

³⁴ Tujuan dan orientasi konflik dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan untuk bertindak terhadap lawan konflik dalam cara-cara tertentu (Kaplowitz 1990).

bahwa tujuan konflik mempengaruhi strategi, meskipun tidak harus ada hubungan langsung diantara keduanya³⁵. Pemilihan strategi konflik bergantung pada situasi dan variabel organisasional baik dalam lingkungan domestik dan internasional, seperti faktor ekonomi dan politik domestik; kapabilitas kekuatan diri; ketersediaan pelaksanaan cara-cara tertentu; kedekatan geografis dengan lawan konflik; organisasi dan birokrasi dalam penentuan politik luar negeri; perilaku pihak ketiga; dan halangan dan konfigurasi regional dan internasional³⁶. Terdapat lima varian strategi yang dibawa oleh Kaplowitz, yakni: 1) *totalist strategy*; 2) *long-run totalist strategy*; 3) *competitive-use-of-force dan deterrent-punitive strategies*; 4) *firm-but-cooperative strategy*; 5) *conciliatory strategy*; dan 6) *latent acceptanceof enemy*.

Tabel 1.1 Tipologi Strategi Konflik, Citra Diri, dan Persepsi Terhadap Musuh

Conflict Strategies	Self-Images	Perceptions of Enemy
Totalism	Highly grandiose manifest; and negative (may be underlying)	Highly negative
Long-run totalism	Grandiose manifest; and negative (may be underlying)	Highly negative, with the belief enemy cannot be defeated in short-run
Manifest long-run totalism; latent acceptance of enemy	Ambivalent or Negative	Negative, with expectations cannot be totally defeated
Competitive-use-of force, deterrent-punitive	Positive or Ambivalent	Negative
Firm-but-cooperative	Positive or Ambivalent	Mixed
Conciliatory-appeasement	Negative or Ambivalent	Positive or Mixed

Sumber: Kaplowitz 1990, 74

³⁵ Kaplowitz, Noel. *National Self-Image, Perception of Enemies, and Conflict Strategies: Psychopolitical Dimensions of International Relations*. 1990, 60.

³⁶ Kaplowitz, Noel. *National Self-Image, Perception of Enemies, and Conflict Strategies: Psychopolitical Dimensions of International Relations*. 1990, 60.

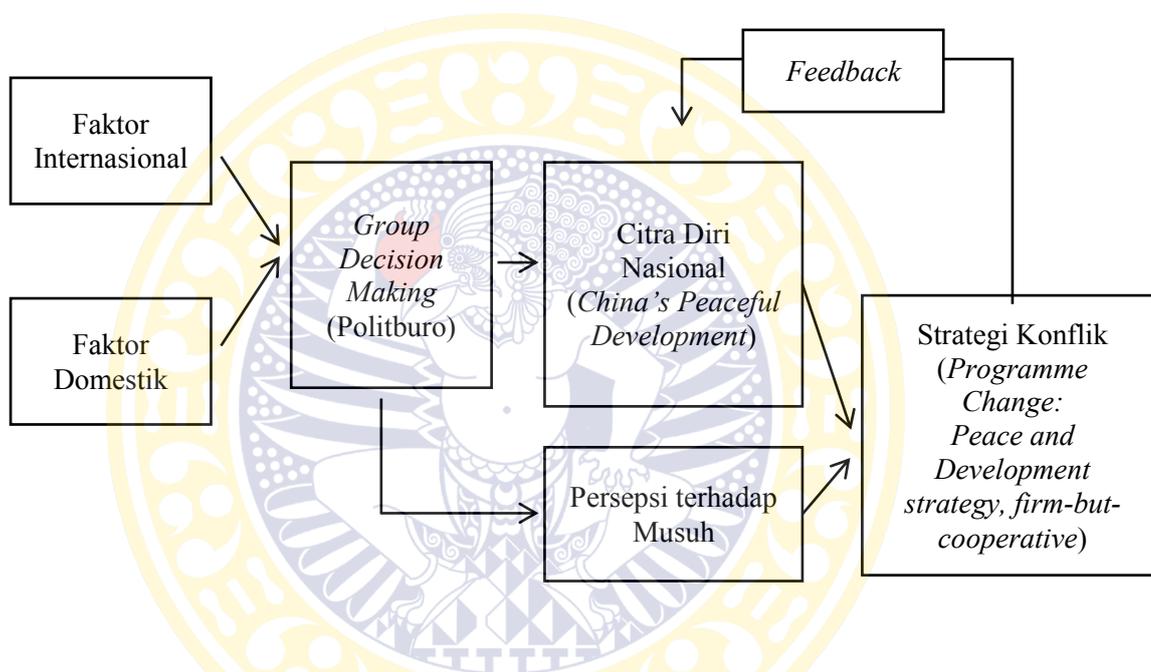
Pada tabel 1.4.2 dapat dilihat hubungan antara variabel citra diri nasional, persepsi terhadap musuh, dan variasi strategi konflik yang menjadi hipotesis penelitian Kaplowitz yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) *totalist strategy* dihasilkan oleh citra diri nasional yang sangat megah dan berifat negatif dengan persepsi terhadap musuh yang sangat negatif; 2) *long-run totalist strategy* dibentuk oleh citra diri nasional yang sangat megah dan negatif dengan persepsi terhadap musuh yang negatif dimana atribut kedua variabel tersebut memberikan kekuatan yang cukup bagi lawan konfliknya yang menyebabkan ia tidak dapat dikalahkan dalam jangka pendek, *long-run totalist strategy* dipilih untuk menyasar kemenangan total namun dalam jangka waktu yang cukup lama; 3) strategi ketiga adalah *long-run totalism strategy* dengan penerimaan laten terhadap musuh yang dihasilkan oleh citra diri nasional yang bersifat ambivalen atau negatif dengan *persepsi terhadap musuh* yang bersifat negatif dimana atribut-atribut variabel keduanya menyebabkan suatu negara merasa bahwa musuhnya tidak dapat dikalahkan; 4) *competitive and deterrent strategy* dihasilkan oleh citra diri nasional yang bersifat positif atau ambivalen dengan persepsi terhadap musuh yang bersifat negatif; 5) strategi *firm-but-cooperative* dibentuk oleh citra diri nasional yang bersifat positif atau ambivalen dengan persepsi terhadap musuh yang bersifat campuran yang meliputi sikap permusuhan yang dapat berubah sewaktu-waktu; dan 6) strategi *conciliatory and appeasement* dihasilkan oleh citra diri nasional yang bersifat negatif atau ambivalen (berhubungan dengan agresivitas militerisme, chauvinisme, atau imperialisme) dengan persepsi terhadap musuh yang bersifat positif.

I.5 Sintesis Teori dan Konsep

Dari tiga konsep dan teori yang telah dijelaskan pada subab tinjauan literatur dan kerangka pemikiran diatas, penulis menarik poin-poin yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena *China's Peaceful Development* sebagai citra diri nasional dalam pembentukan strategi konflik Cina yang bersifat kooperatif namun tegas dalam upaya reunifikasi dengan Taiwan, yakni: 1) bahwa perubahan politik luar negeri berasal dari sumber-sumber domestik dan internasional, hal ini mengindikasikan bahwa politik luar negeri tidak dimunculkan begitu saja, terdapat sebab-sebab yang melatarbelakangi negara dalam pembuatan politik luar negerinya; 2) bahwa faktor-faktor ideasional yang termuat dalam identitas nasional dapat membentuk politik luar negeri suatu negara, tidak terbatas pada identitas nasional yang sengaja dibentuk oleh aktor-aktor pembuat keputusan untuk mempertahankan kepentingan nasional; 3) baik dalam teori perubahan politik luar negeri, peringkat analisis identitas, dan teori psikopolitik yang telah dijabarkan diatas menekankan pada peran aktor pembuat keputusan (baik individu dan kelompok) sebagai artikulator sumber-sumber perubahan dan identitas citra diri nasional untuk kemudian diwujudkan dalam aksi politik luar negeri; 4) hubungan antara citra diri nasional dan pemilihan strategi konflik adalah bahwa semakin positif citra diri nasional suatu negara, maka semakin besar kecenderungan untuk menggunakan strategi kooperasi yang menghendaki hasil memuaskan bagi kedua belah pihak dalam situasi konflik; 5) semakin rasional dan positif persepsi terhadap lawan konfliknya, maka semakin rasional dan efektif kebijakan yang dihasilkan dalam isu konflik yang tengah dihadapi; dan 6) bahwa strategi konflik merupakan pertemuan antara citra diri

nasional dan persepsi terhadap musuh, tidak terbatas pada kedua variabel itu saja, strategi konflik dipilih berdasarkan situasi dan kondisi organisasional dalam level domestik dan internasional, hal ini mengindikasikan bahwa strategi konflik dipilih berdasarkan pertimbangan sumber-sumber yang berasal dari faktor-faktor domestik dan internasional.

Bagan 1.2: Visualisasi Alur Berfikir Penulis



I.6 Thesis Statement

Peran konsepsi *China's Peaceful Development* terhadap perubahan strategi dalam upaya reunifikasi dengan Taiwan merupakan akumulasi proses: 1) faktor-faktor internasional dan domestik yang sedemikian rupa mempengaruhi kelompok pengambil keputusan (Politburo Partai CCP Cina) yang kemudian diwujudkan dalam pembentukan *China's Peaceful Development* sebagai citra diri nasional yang bersifat positif; 2) adanya pembentukan citra diri nasional yang bersifat positif dan persepsi terhadap Taiwan yang bersifat campuran (positif dan negatif)

kemudian mempengaruhi perilaku strategi konflik Cina dalam upaya reunifikasi dengan Taiwan dengan pembentukan strategi *Peace and Development* yang bersifat *firm-but-cooperative*. Perubahan strategi Cina dengan menggunakan strategi *Peace and Development* merupakan pendukung *China's Peaceful Development* sebagai citra diri nasional yang memegang prinsip non kekerasan sebagai bukti bahwa Cina menghendaki pendekatan-pendekatan damai.

I.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1 Citra Diri Nasional: *China's Peaceful Development*

Secara terminologi ilmu psikologi, citra diri didefinisikan sebagai persepsi subjektif total terhadap diri sendiri, termasuk didalamnya mengenai pandangan terhadap dirinya dan impresi diri sendiri terhadap kepribadian, kemampuan, dan lain sebagainya³⁷. Citra diri nasional oleh Clunan digambarkan sebagai akumulasi dari aspirasi-aspirasi historis seperti mitos, legenda, dan cerita kebanggaan masa lalu yang kemudian membentuk pandangan terhadap diri sendiri sebagai entitas tertentu³⁸. Citra diri nasional yang merupakan bentuk identitas kognitif yang dibentuk melalui bagaimana sebuah negara memandang dirinya sendiri yang merupakan tahapan awal mengenai bagaimana suatu negara membedakan dirinya dengan yang lain. Citra diri nasional diciptakan oleh elit politik berdasarkan nilai-nilai kultural, ikatan emosional diantara manusia dan teritori yang ditinggali. Citra diri nasional cenderung bersifat dinamis karena dibentuk oleh elit-elit politik yang

³⁷ Coon, D. *Essentials of Psychology*, 6th ed. Los Angeles, West Publishing Co. 1994; 471.

³⁸ Clunan, Anne L. *The Social Construction of Russia's Resurgence: Aspirations, Identity, and Security Interests*. 2009, 6.

tengah berkuasa dan berfungsi sebagai pedoman mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh negara.

China's Peaceful Development sebagai citra diri nasional dapat diidentifikasi dari: 1) ide-ide mengenai status internasional dan tujuan politik yang ingin dicapai; 2) preskripsi mengenai menjadi apa dan apa yang harus dilakukan oleh negara; 3) menekankan peran kelompok pembuat keputusan sebagai pembentuk dan artikulator citra diri nasional dengan pertimbangan historis yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan dan politik luar negerinya. Keseluruhan identifikasi tersebut diatas telah dituangkan dalam Buku Putih Cina yang berjudul *China's Peaceful Development Road* yang diterbitkan pada 2005 dan juga *China's Peaceful Development* yang diterbitkan pada September 2011³⁹.

Berikut adalah kutipan Buku Putih Cina yang memuat identifikasi *China's Peaceful Development* yang bersumber dari Buku Putih *China's Peaceful Development* 2011:

“Viewed in the broader, global and historical context, the path of peaceful development may be defined as follows: China should develop itself through upholding world peace and contribute to world peace through its own development. It should achieve development with its own efforts and by carrying out reform and innovation; at the same time, it should open itself to the outside and learn from other countries. It should seek mutual benefit and common development with other countries in keeping with the trend of economic globalization, and it should work together with other countries to build a harmonious world of durable peace and common prosperity. This is a path of scientific, independent, open, peaceful, cooperative and common development ... China's overall goal of pursuing peaceful development is to promote development and harmony domestically and pursue cooperation and peace internationally ... The world has been believed to be a harmonious whole in the Chinese culture ever since the ancient times. This belief has a lasting impact on the thinking and acts of the Chinese nation, which is an important value that the Chinese people follow in handling interpersonal relationships, the relationship between man and nature and relations between different

³⁹ Teks lengkap *China's Peaceful Development Road* dan *China's Peaceful Development* terlampir.

countries. The Chinese people have always cherished a world view of “unity without uniformity,” “harmony between man and nature,” and “harmony is invaluable.” This belief calls for the fostering of harmonious family bond, neighborhood harmony and good interpersonal relationships.”⁴⁰

Kutipan teks tersebut diatas telah mengidentifikasi *China's Peaceful Development* sebagai citra diri nasional karena telah memuat ide-ide mengenai status internasional Cina dan tujuan politik yang ingin dicapai dalam konstelasi politik global, preskripsi mengenai menjadi apa dan apa yang harus dilakukan oleh negara dalam konstelasi politik internasional, dan juga pertimbangan historis yang diklaim oleh Cina sebagai nilai-nilai yang selalu dijunjung oleh Cina.

1.7.1.2 Strategi Konflik: *Peace and Development Strategy*

Menurut Kaplowitz, strategi konflik adalah rencana dan aksi yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan untuk bertindak terhadap lawan dengan cara-cara tertentu di dalam konflik⁴¹. Hal ini berarti strategi konflik adalah sebuah tata kelola cara yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan ditujukan pada lawan dalam kondisi konflik. *Peace and Development Strategy* sebagai strategi konflik dapat diidentifikasi dari rangkaian-rangkaian cara yang diterapkan oleh Cina kepada Taiwan, seperti meningkatkan investasi ekonomi (menciptakan dependensi ekonomi), mempermudah arus masuk dan keluar warga negara Cina ke Taiwan (menciptakan intensitas interaksi sosial warga Cina dan Taiwan), dan menegaskan kembali pentingnya pertukaran budaya

⁴⁰ The State Council The People's Republic of China. 2011. *China's Peaceful Development*. Tersedia dalam http://english.gov.cn/white_paper/2014/09/09/content_281474986284646.htm (diakses pada 4 November 2014)

⁴¹ Kaplowitz, Noel. *National Self-Image, Perception of Enemies, and Conflict Strategies: Psychopolitical Dimensions of International Relations*. 1990, 58-60.

Cina dalam nuansa semangat nasionalisme Cina untuk memperkuat identitas etnis Cina dari orang-orang Taiwan. Hal ini menunjukkan bahwa Cina menggunakan instrumen budaya sebagai salah satu strategi konflik untuk reunifikasi⁴². Selain itu Cina juga menggunakan instrumen diplomasi dalam politik internasional, seperti ketika pada 2008 Cina menerima tawaran Presiden Taiwan, Ma Ying-jeou, untuk menghentikan sementara kompetisi diplomatis dengan Taiwan. Cina membuktikan keseriusan gencatan senjata diplomatis dengan menolak beberapa negara aliansi diplomatik Taiwan untuk berpindah pengakuan kedaulatan terhadap Cina. Instrumen diplomasi juga didapati ketika Cina memberikan akses kepada Taiwan sebagai *observer* dalam pertemuan *World Health Assembly* dan telah mengikuti *International Health Regulations* yang diadakan oleh *World Health Organization*.

I.7.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian eksplanatif yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan yang lainnya. Tipe penelitian eksplanatif mencoba mencari hubungan sebab akibat antara suatu variabel dengan variabel lain⁴³. Variabel yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah identitas citra diri nasional dan strategi konflik suatu negara. Tipe penelitian ini dipilih untuk memudahkan peneliti dalam menjelaskan dan menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan yang lain dimana hipotesis digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian.

⁴² Chu, Shulong. 2013. *Cross-Taiwan Strait Relations: Opportunities and Challenges*. 2013, 10-11.

⁴³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 51.

I.7.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup pada tahun 2002 hingga 2013. Hal ini didasarkan pada pertimbangan: 1) tahun 2002 merupakan tahun dimana Zheng Bijian dan delegasi Partai Komunis Cina (CCP) mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat dengan administrasi Bush untuk mendiskusikan mengenai pandangan Amerika Serikat dalam peningkatan peran Cina dalam politik global, even ini mengawali ide pembentukan konsepsi *China's Peaceful Rise* yang menjadi akar dari identitas citra diri nasional *China's Peaceful Development* pada pemerintahan Hu Jintao; 2) tahun 2013 adalah tahun penandatanganan *Cross-Strait Service Trade Agreement* yang dinilai sebagai momentum kunci kerjasama Cina dan Taiwan tidak hanya dalam bidang ekonomi namun juga dalam bidang sosial dan budaya.

I.7.4 Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif dengan menekankan pada studi kepustakaan sebagai sumber data primer. Studi kepustakaan menekankan pada proses membaca dan mengevaluasi untuk membantu memperkaya pemahaman peneliti dalam memahami topik permasalahan yang diteliti⁴⁴. Selain itu sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan juga akan turut disertakan seperti data dokumentasi, data teks, dan data-data elektronik berbasis internet. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Mengikuti alur kegiatan

⁴⁴ Roselle, Laura dan Spray, Sharon, *Scholarly Literature and The Literature Review*, dalam *Research and Writing in International Relations*. New York: Pearson Longman: 17-34.

yang digunakan oleh Miles dan Humerman, analisa data kualitatif ini akan mengikuti tiga tahapan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan⁴⁵. Reduksi merupakan tahapan pemilihan data, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data untuk mempermudah penggunaan data dalam penelitian⁴⁶. Penyajian data adalah tahapan pembuatan sekumpulan informasi yang mendukung penarikan kesimpulan dalam penelitian⁴⁷.

I.7.4 Sistematika Penulisan

Penelitian berjudul “Peran Citra Diri Nasional terhadap Perubahan Strategi Konflik Cina dalam Upaya Reunifikasi dengan Taiwan” akan dijabarkan dalam empat bab.

BAB I Berisi proposal penelitian yang memuat pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan tentang garis besar mengenai penelitian yang dipilih, termasuk di dalamnya adalah alasan pemilihan topik.

BAB II Berisi penjelasan mengenai sejarah, perkembangan, dan bentuk-bentuk strategi sebagai upaya reunifikasi Cina-Taiwan dari masa ke masa. Bab ini juga berisi uraian mengenai faktor-faktor domestik dan internasional yang sedemikian rupa mempengaruhi kelompok pengambil keputusan (Politburo Partai CCP Cina) untuk membentuk *China's Peaceful Rise* sebagai citra diri nasional.

⁴⁵ Punch, Keith F. *Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches Second Edition*. London: SAGE Publications Ltd. 2005, 197.

⁴⁶ Punch, Keith F. *Introduction to Social Research*, 198.

⁴⁷ Punch, Keith F. *Introduction to Social Research*, 198.

BAB III Merupakan analisa mengenai citra diri nasional *China's Peaceful Development* yang bersifat positif dan persepsi terhadap Taiwan yang bersifat campuran (positif dan negatif) yang kemudian mempengaruhi perilaku strategi konflik Cina dalam upaya reunifikasi dengan Taiwan dengan pembentukan strategi *Peaceful Development* yang bersifat *firm-but-cooperative*.

BAB IV Merupakan penutup dan kesimpulan yang didasarkan pada analisa bab-bab sebelumnya.

